

NOTULENSI RAPAT

Agenda : Kunjungan Kerja ke DPRD Kab Takalar
 Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
 Pukul : 10.00 Wita s/d Selesai
 Tempat : Kantor DPRD Kab Takalar
 Pimpinan Rapat : Ir. H. Ahmad Yani, ST, SE, M.Si, IPM
 Peserta Rapat :
 - Ketua DPRD Kab Takalar
 - Anggota DPRD Kab Takalar
 - Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara
 - Sekretaris Dewan DPRD Kab Kutai Kartanegara
 - Staf DPRD Kab Kutai Kartanegara
 - Tenaga Ahli DPRD Kab Kutai Kartanegara

Kegiatan		
Wakil Ketua DPRD Kab Takalar M Fadil Ahmad	-	Anggota DPRD Kab Takalar periode sebelumnya 30 orang pada periode 2024 sebanyak 35 anggota DPRD Berdasarkan surat yang masuk ke DPRD Kab Takalar kunjungan teman-teman DPRD Yang hadir pada hari ini ada dari Fraksi Gelora, Fraksi PDI P, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem.
	-	
Ketua DPRD Kukar Bapak Ir. H. Ahmad Yani, ST, SE, M.Si, IPM	: -	Ketua DPRD Kab Kutai Kartanegara memperkenalkan seluruh anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara yang hadir dari Pansus Pembentukan 7 desa wilayah Kab Kutai Kartanegara, di Kab Kutai Kartanegara ada 45 Anggota DPRD. Ketua Pansus 1 Desman Minang Ketua Pansus 2 Taufik Wakil Ketua Pansus 3 Agustinus Wakil Ketua Pansus 4 Syafruddin Kunjungan DPRD Kab Kutai Kartanegara ke Kab

		Takalar adalah untuk menggali informasi terkait pembentukan desa baru, sekedar informasi di Kab Kutai Kartanegara ada 193 Desa 44 Kelurahan. - APBD Kab Kutai Kartanegara tahun 14 Triliun sampai dengan tahun 2025 ini. - Kami ingin mendapatkan informasi terkait dengan pembentukan desa, karena di Kab Takalar pembentukan desa sudah menjadi Peraturan Daerah, hal ini menjadi alasan kami berkunjung ke Kab Takalar, karena ingin menggali hal-hal yang menjadi acuan dalam pembentukan desa baru seperti persoalan batas wilayah, kondisi infrastruktur, -
Ketua DPRD Kab Takalar H Muhammad Rijal		- Saya menjadi anggota DPRD Kab Takalar ini pertama kali sehingga belum bisa memberikan Gambaran secara utuh terkait pemekaran desa di Kab Takalar - Namu ada beberapa anggota DPRD Kab Takalar yang paham terkait pemekaran desa tahun 2021-2022
Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara (Pak Johansyah)		- Pada saat pembentukan desa baru, ada pembagian anggaran untuk desa persiapan sebesar 30% yang diambil dari desa induk, pada saat desa persiapan menjadi desa definitif apakah untuk penganggaran langsung mendapat anggaran full sebagai desa definitif ?
Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara (Pak Desman Minang)		- Pemekaran desa Kab Takalar merujuk pada Perda Nomor 7 tahun 2022 di Kab Takalar - Koordinasi yang baik antara Pemerintah Kab dengan DPRD Kab Takalar sehingga dapat tercapai pembentukan desa baru di Kab Takalar - Untuk melakukan evaluasi setelah desa menjadi definitif apakah perlu membentuk pansus kembali untuk melakukan pengawasan dan evaluasi?
Pak H Nurdin Anggota DPRD Kab Takalar		- Terkait pemekaran desa dimulai dari jumlah penduduk di Kab Takalar minimal 3.000 jumlah penduduk, namun kami siasati tidak

	menggunakan jumlah penduduk, namun menggunakan jumlah KK, karena dalam satu rumah bisa sampai 2 dan 3 KK - Sebelum pemekaran kami sudah melakukan penetapan batas wilayah dengan pendampingan dari TNI sehingga pada saat pembentukan pansus tidak ada permasalahan lagi terkait batas wilayah - Kondisi pemekaran desa yang mengisi sebagai kepala desa adalah pejabat desa sehingga mudah dalam koordinasi - Kemudian terkait dengan dana desa untuk desa definitif akan mendapatkan anggaran desa secara utuh pada tahun selanjutnya, tidak bisa mendapat dana desa pada tahun yang sama. - Perlu ada koordinasi dengan beberapa Kementerian karena pemekaran ini tidak hanya 1 kementerian, ada kementerian desa, Kementerian keuangan, jika dilihat proses pembentukan desa tidak semudah yang dilihat, sehingga perlu ada komunikasi yang baik dengan Kementerian. - Di DPRD ini hanya membentuk Perda saja, namun persyaratan-persyaratan yang ada juga wajib dipenuhi -
Anggota DPRD Kab Takalar (Partai Demokrat)	- Di DPRD Kab Takalar dalam pembentukan desa baru sebanyak 11 Desa hanya dengan 1 Pansus - Koordinasi dengan Kementerian dilakukan setelah kami mendapatkan register dari Gubernur Sulawesi Selatan, setelah mendapat register Gubernur baru kita koordinasi dengan Kementerian -
Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara (Pak Junadi)	- Terkait batas wilayah tadi disampaikan bekerjasama dengan Kodam, apakah kerjasama ini dengan DPRD atau dengan Pemerintah Daerah (Jawabannya Pemda) hal ini juga bisa menjadi contoh untuk DPRD Kab Kutai Kartanegara dalam penetapan batas wilayah
Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara (Pak Sugeng)	- Saya mewakili pansus, di pansus kami banyak penduduk desa yang berstatus transmigran sehingga sudah terpupuk rasa kekeluargaan antara penduduk desa, sehingga ada sedikit

		kendala terkait pembentukan desa baru namun kemarin sudah diberikan penjelasan dan melakukan koordinasi sehingga terkait batas wilayah dapat diselesaikan dengan baik. -
Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara (Pak Sopan Sopian)		- Bagaimana menyikapi anggaran desa yang terpisah dengan anggaran desa induk, yang berkaitan dengan Pembangunan infrastruktur desa persiapan.
Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara (Pak Erwin)		- Setelah pemekaran desa berhasil apakah apa dampak positif dari teman-teman pansus terkait pemilihan legislative dan penyusunan tim pemenangan di desa yang baru dibentuk
Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara (Bu Hamdiah)		- Apakah di Kab Takalar ada memiliki Kelurahan, kemudian dengan pembentukan desa baru akan mendapat anggaran dari pemerintah pusat -
Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara (Pak Budiman)		- Terkait tapal batas yang bekerjasama dengan Kodam, karena di Kab Kukar sampai dengan hari ini belum selesai, dengan keterlibatan Kodam tadi apakah ini bisa meminimalisir terkait dengan permasalahan tapal batas?
Pak H Nurdin Anggota DPRD Kab Takalar		- Terkait anggaran dana desa, penambahan desa baru akan mengurangi anggaran APBD - Terkait dengan dana desa dari pemerintah pusat ada rumusnya dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah - Terkait dengan tapal batas wilayah Pemkab Kukar harus menyiapkan anggaran untuk tapal batas, dan ini ada edaran dari Mendagri untuk mengalokasi dana dari APBD untuk penetapan tapal batas.
Anggota DPRD Kab Takalar (Gerindra)		- Kukar APBD nya 14 Triliun Kab Takalar APBD nya 1,2 Triliun, di Takalar untuk menyelesaikan 11 cukup dengan 1 pansus, sedangkan di Kukar 7 Desa 4 Pansus - Dampak dari pemekaran desa dapat merugikan pemerintah daerah, sehingga DPRD harus mengawal dengan serius, secara politik dapat menguntungkan DPRD pada saat pemilu karena kita memiliki jasa dalam pembentukan desa baru - Terkait tapal batas kami membuka kantor cabang

		Mendagri di Kab Takalar dan membuka cabang kantor Kab di Jakarta untuk mempermudah dalam proses komunikasi dalam pembentukan desa baru terutama dalam pemenuhan syarat-syarat yang ada di Mendagri, hal paling utama adalah komunikasi yang baik Pemda dan Mendagri, kami di Kab Takalar menyelesaikan pembentukan desa baru hanya dalam 9 bulan untuk 11 Desa
DPRD Kab Takalar Demokrat		- Tingkat kesulitan dalam pembentukan desa lebih rumit dari pada pembentukan kecamatan, karena dalam pembentukan kecamatan tidak membebankan anggaran Pemerintah Pusat, sedangkan pembentukan desa pasti memberatkan anggaran pemerintah pusat karena ada anggaran desa dibebankan ke Anggaran Pemerintah Pusat. -
Pak Aji SerangDPRD Kab Takalar (PDI P)		- Saya adalah mantan kepala desa sedikit banyaknya paham terkait pembentukan desa - Sebenarnya kita bertugas membahas terkait pembentukan desa, bahan yang diberikan kepada DPRD sebenarnya sudah barang jadi, sehingga hanya memastikan kelengkapan berkas - Setelah disampaikan ke Mendagri, Kementerian akan turun kelapangan untuk melakukan verifikasi dengan data yang mereka miliki - Tentang dana desa, ketika desa baru sudah terbentuk maka tidak ada mempengaruhi dana desa induk, ada ADD dan DAD, pembagian merujuk ke jumlah penduduk, jumlah kemiskinan, luas wilayah dan letak geografis - Dampak politik, ketika ada banyak pembentukan desa maka akan memicu pemekaran kecamatan maka akan mempengaruhi jumlah anggota DPRD, dampak positif nya maka ada penambahan dapil dan penambahan jumlah anggota DPRD - Pendapatan kelurahan, BOK Kelurahan 200 juta sedangkan BOK Desa 2 Milyar jika kelurahan ingin menjadi desa maka hampir semua kelurahan ingin menjadi desa, karena dana BOK nya lebih besar desa dari Kelurahan - Tapal batas, kami kebetulan kepala desa pemekaran, batas wilayah kami adalah batas alam,

		dalam permasalahan tapal pastikan dulu dengan desa lama untuk menyepakati tapal batas terlebih dahulu.
PENUTUP		